

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Dadang Sukandar, *membuat surat perjanjian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011).
- G.H.S Luban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Gunawan Wijaya, *et.al, Seri Hukum Bisnis dan Jamin Fidusia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001)
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2017)
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2017)
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Libertus Jehani, *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2007).
- Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik, 2015).
- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Aspek Prespektif Kebijakan Perbandingan Dan Harmoni Hukum Pidana*, (Ciputat: Gaung Persada Pres Group, 2004).
- Moch. Chidir Ali, *Pengertian Eleementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 1993)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, (Yogyakarta : Gradien Mediatama, 2009)
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Salim HS, *et.al, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika:2002)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2010)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
 Subekti, et.al, *Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008).
 Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
 Suharnoko, *Hukum Perjanjian, (Teori dan Analisis Kasus)*, (Jakarta : Kencana, 2012)
 Surawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
 Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004)
 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 2003)
 Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986)
 Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
 Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012)
 Zunita Sari, et.al, *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perikatan Jual Beli (Studi di Kantor Notaris Ny. Susilowati Acmad, S.H)*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Hukum, 2021)

Jurnal

Amara Ayu Maharani, Sri Laksmi Anindita, “Kekuatan Pembuktian Penjaminan Utang Piutang melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, *Unes Law Review*, Vol. 7, No.1 September 2024, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
 Azhari Idris, “Perlindungan Hukum bagi Pihak Pembeli Hak Atas Tanah melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol.4, No.3 Desember 2024.
 Bernadeta Resti Nurhayati, “Penyalahgunaan Keadaan sebagai dasar Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5, No.1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>.
 Dewi Kurnia Putri Dan Amin Purnawan, “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas”, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 4, 2017. DOI: <https://doi.org/10.30659/akta.4.4.623%20-%20634>.
 Dian Ekawati, et.al, “Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia”, *Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang*, Vol. 2, Nomor 1, 2021.
 Fadhila Restyana Larasati dan Mochammad Bakri, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pada Putusan Hakim Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 4, 2018. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk15410>.
 Leny Kurniawati, “Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2018. DOI: 10.33474/HUKENO.V2I1.1056.
 Lia Oktavia, “Pengenalan Proses Gugatan dalam Hukum Acara Perdata”, *Media Hukum Indonesia*, Vol.2, No. 4 Desember 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.
 Nurul Wahyu Wijiyanti dan Siti Malikhatun Badriyah, “Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dengan adanya Tipu Muslihat dan Daya Paksa”, *Jurnal Ilmu Hukum, humaniora, dan politik*, Vol.4 No. 4 Mei 2024. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.

- Raymond Aristyo, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta PPJB dan Akta Kuasa untuk Menjual sebagai Jaminan terjadinya Utang Piutang”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 12, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p13>.
- Retna Gumanti, “Syarat Sah Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)”, Jurnal Pelangi ilmu, Vol. 5, No.1, 2012.
- Septrianti, Ni Kadek, I Nyoman Sumardika, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli”, Jurnal Unterprestasi Hukum, Vol.1, No. 1, 2020.
- Shelby Azzahra, “Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Pembeli dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang merupakan Kelanjutan adanya Utang Piutang”, Jurnal Notarius, Vol.2, No. 2 Juli – Desember 2013.

Tesis

- Alfiansyah, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, “Urgency Hinding Sale Agreement Deed Of Land That Made By Notary”, Tesis, Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.
- Bhim Prakoso, “Materi II Kuliah Hukum Kontrak”. Tesis, Jember : Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, 2010.
- Ivan Latifah Permana, “Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah yang didasari dengan Perjanjian Utang Piutang terhadap Para Pihak dan Notaris”, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Ni Kadek Mekar Sari, “Pertanggungjawaban Penerima Kuasa Menjual Sekaligus sebagai Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tidak Lunas dengan Akta Notariil”, Tesis, Makassar: Program Studi Magister Kenotariatan, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Herizen Inlandsch Reglement (HIR)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1996)
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6624).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Putusan Nomor: 825/Pdt.G.Plw/2016/PN JKT.SEL.

Putusan Tinggi DKI Jakarta Nomor Putusan Nomor: 282/PDT/2018/PT DKI.

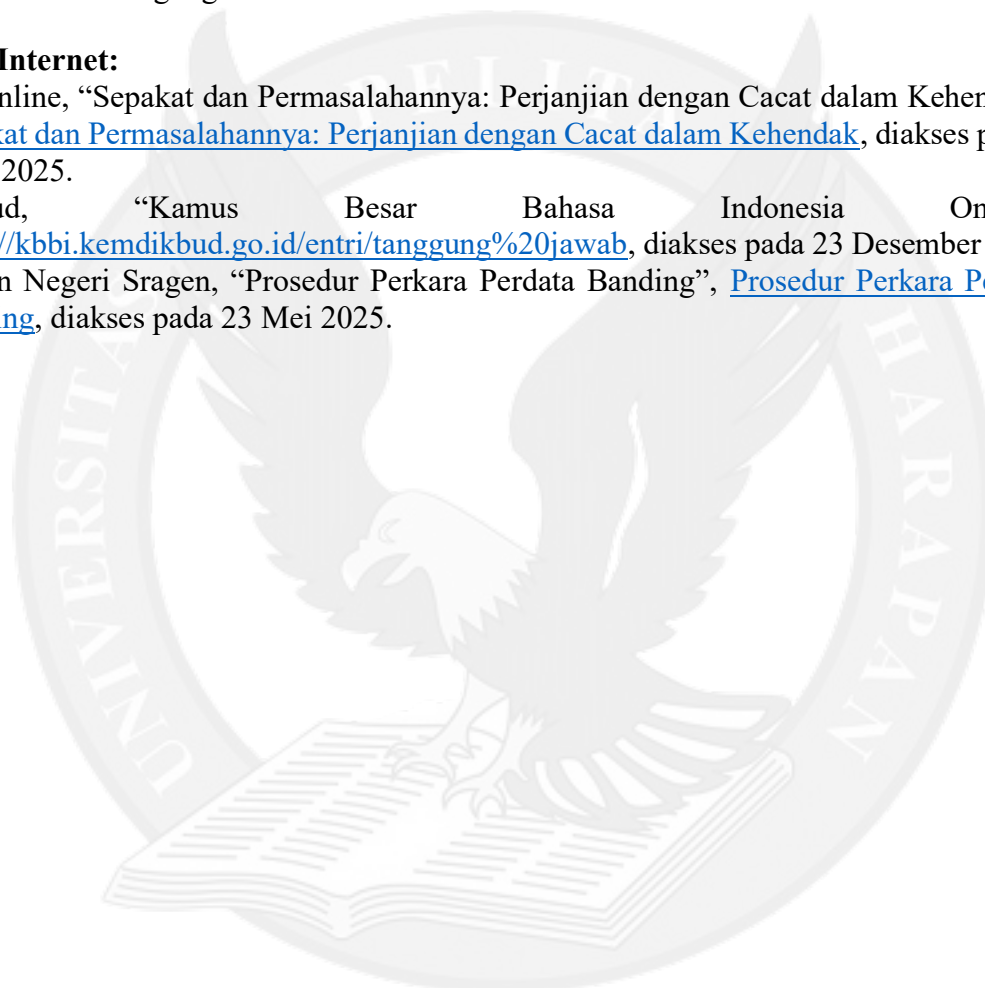
Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Nomor: 2461 K/Pdt/2019

Website/ Internet:

Hukum Online, “Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak”, [Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak](#), diakses pada 8 April 2025.

Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses pada 23 Desember 2024.

Pengadilan Negeri Sragen, “Prosedur Perkara Perdata Banding”, [Prosedur Perkara Perdata Banding](#), diakses pada 23 Mei 2025.



LAMPIRAN

